

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*, *LEVERAGE* DAN LIKUIDITAS TERHADAP  
PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING*  
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Akuntansi



Oleh :

**DINNA RIYANI**

**2014310389**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2018**

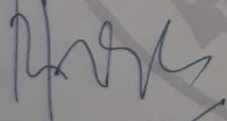
## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Dinna Riyani  
Tempat, Tanggal Lahir : Trenggalek, 9 Juni 1996  
N.I.M : 2014310389  
Program Studi : Akuntansi  
Program pendidikan : Strata 1  
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan  
Judul : Pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage* dan  
Likuiditas Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

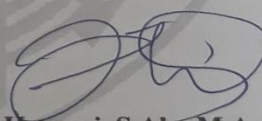
Tanggal : 16 Maret 2018



(Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE, M.Si., CTA)

Co. Dosen Pembimbing,

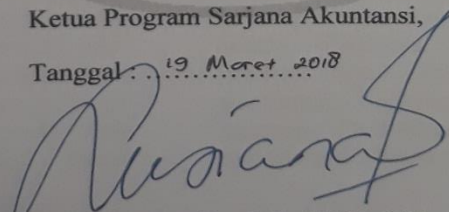
Tanggal : 16 Maret 2018



(Indah Hapsari, S.Ak., M.A., Ak.)

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Tanggal : 19 Maret 2018



(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK)

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE DAN LIKUIDITAS  
TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING  
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

**Dinna Riyani**

STIE Perbanas Surabaya

Email: riyanidinna96@gmail.com

**ABSTRACT**

*Islamic Social Reporting is the standard index of performance reporting in sharia-based companies. This index was born on the basis of reporting standards based on AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). The objective of this research was to knowing the extent of Corporate Governance, leverage dan liquidity of Islamic Social Reporting Disclosure (ISR). The independent variables were used in this study is The Board of Comisionner, The Board of Directors, The Audit Comitte, Sharia Supervisory Boad, leverage and liquidity, while the dependent variable is the ISR disclosure. Samples were taken by using census sampling technique. The final sample as many as 12 islamic bank in Indonesia on 2012-2016. Data analysis method of the data used in this research is descriptive analysis, classical assumption test, and multiple linear regression using SPSS 23 for windows. The results of this study showed that The Board of Comisionner and liquidity has effect ISR disclosure. The Board of Directors, The Audit Comitte, Sharia Supervisory Boad, leverage does not affect the ISR disclosure.*

**Keywords:** *The Board of Comisionner, The Board of Directors, The Audit Comitte, Sharia Supervisory Boad, leverage, liquidity and ISR disclosure*

**PENDAHULUAN**

Perusahaan perbankan syariah di Indonesia melakukan pelaporan sosial pada dasarnya disebabkan oleh perubahan paradigma pertanggungjawaban dari manajemen ke *shareholder* menjadi manajemen ke *stakeholder* serta untuk menjaga citra perusahaan di masyarakat. Perbankan syariah menjadi perhatian khusus pada hal pelaporan tanggung jawab sosial disebabkan oleh prinsip dasar operasional bank syariah yang menyebutkan bahwa tidak hanya *profit oriented* tetapi juga berorientasi pada *fa'lah*. Menurut Undang-Undang RI No 21 Tahun

2008 pasal 4 yang mengungkapkan bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial pada bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Tanggung jawab sosial merupakan salah satu bentuk keterlibatan lingkungan perusahaan dan masyarakat dalam mencapai tujuan bisnisnya. Organisasi perusahaan dituntut untuk ikut berkontribusi dalam perubahan lingkungan serta berkontribusi langsung terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Dimana hal ini diharapkan dapat

menggambarkan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) Bank Umum Syariah. Pelaporan pertanggungjawaban sosial (*Islamic Social Reporting*) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Secara umum tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis dan memenuhi seluruh aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan baik demi pembangunan yang berkelanjutan (Fitria dan Hartanti, 2010). Konsep tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam berhubungan dengan perusahaan atau entitas bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan konsep syariah dan diharapkan perusahaan tersebut dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara islami. Ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif islam, yaitu pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*).

Sejalan dengan peningkatan pelaksanaan CSR dalam konteks islam,

## **KERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS**

### ***Corporate Governance***

*Corporate Governance* menurut forum for *Corporate Governance in Indonesia* (2001:2) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan *stakeholders* dan *shareholder* dalam perusahaan antara lain para pemegang saham, pengurus, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. *Organization for*

semakin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah terutama pengungkapan sosial pada perusahaan atau lembaga berbasis syariah. Dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan atau lembaga syariah, banyak diperbincangkan mengenai *Islamic Social Reporting* (ISR). Pengungkapan tanggung jawab sosial bersifat syariah dikembangkan dengan menggunakan *Islamic Social Reporting Index*.

Pengungkapan dana sosial pada Bank Umum Syariah sebatas disajikan pada laporan dana qardul hasan atau dana kebajikan, sedangkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) masih bersifat sukarela (*voluntary*). Pada perspektif islam, transparansi merupakan salah satu amanah yang menuntut organisasi untuk melakukan pengungkapan, baik yang bersifat wajib (*mandatory*) maupun sukarela (*voluntary*). Sehingga berdampak pada pengungkapan tanggung jawab setiap perbankan syariah menjadi berbeda. Perbedaan pengungkapan tersebut disebabkan tidak adanya standar syariah yang baku tentang pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial (Asrori, 2015).

*Economic Cooperation and Development* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai struktur hubungan yang berkaitan dengan tanggung jawab di antara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer yang dirancang untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama perusahaan. Menurut surat edaran Bank Indonesia No.12/13/DPBs tahun 2010 perihal pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, unsur *Corporate Governance* yang terdapat dalam Bank

Umum Syariah adalah meliputi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite-Komite (Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi), Dewan Pengawas Syariah serta penerapan fungsi audit internal dan audit eksternal

### ***Islamic Social Reporting***

*Islamic Social Reporting* adalah standar pelaporan kinerja perusahaan berbasis syariah. Indeks ini lahir dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI. Secara khusus, indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat yang tidak hanya mengenai peran perusahaan pada perekonomian, tetapi juga peran perusahaan pada perspektif spiritual. Indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria dan Hartati, 2010). Indeks ISR merupakan tolok ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah

### **Pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting***

Dewan Komisaris adalah dewan yang bertugas melakukan pengawasan pada perusahaan serta memberi nasihat kepada Direksi. Semakin besar Dewan Komisaris semakin baik pula pengawasan yang dilakukan, termasuk pengawasan terhadap prinsip sosial yang ada di Bank Umum Syariah. Terciptanya pengawasan yang baik diharapkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* juga akan semakin tinggi. Hal tersebut dapat meminimalisir informasi yang mungkin dapat disembunyikan oleh manajemen sebagai bentuk pelaksanaan amanah dan tanggung jawab penuh perusahaan yang sejalan dengan *Syariah Enterprise Teori*.

Dengan adanya struktur Dewan Komisaris akan mewujudkan pengelolaan dan akuntabilitas tinggi yang dapat menciptakan hubungan baik kepada

yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam (Othman et al, 2009). Sesuainya indeks ISR untuk entitas islam karena mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba, spekulasi dan gharar, serta mengungkapkan zakat, status kepatuhan syariah serta aspek-aspek sosial seperti sodaqoh, waqof, qordul hasan, sampai dengan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan (Asrori, 2015). Indeks ISR kemudian dikelompokkan menjadi enam indikator pengungkapan yaitu: (1) Investasi dan keuangan, (2) Produk dan Jasa, (3) Tenaga Kerja, (4) Sosial, (5) Lingkungan dan (6) Tata Kelola Organisasi

masyarakat sehingga kontrak sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan teori legitimasi. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Baidok dan Septiarini (2016), Khoirudin (2013) serta Charles (2012) bahwa terdapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hipotesis 1 : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan ISR

### **Pengaruh Dewan Direksi terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting***

Dewan Direksi adalah dewan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan Direksi merupakan unsur *Corporate Governance* yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Dewan Direksi memiliki peranan tidak terbatas pada kegiatan rutin, melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan perseroan masa mendatang. Sehingga perlu komposisi jumlah Dewan Direksi yang tepat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Semakin besar jumlah Dewan Direksi, maka diharapkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* juga akan meningkat.

Terlaksananya dengan baik tugas dan fungsi Dewan Direksi tersebut maka dapat terwujudnya bentuk pemenuhan amanah yang diberikan sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban yang terdapat dalam *Syariah Enterprise Teori*, serta keselarasan hubungan antara masyarakat dan Bank Umum Syariah juga dapat terwujud sesuai dengan teori legitimasi. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan Sunarto (2016) bahwa terdapat pengaruh positif Dewan Direksi terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hipotesis 2 : Dewan Direksi berpengaruh terhadap pengungkapan ISR

### **Pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting***

Komite Audit adalah suatu badan yang berada dibawah Dewan Komisaris yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris dalam hal mengevaluasi laporan audit dan laporan *Good Corporate Governance*. Semakin besar jumlah anggota Komite Audit, maka diharapkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* dapat meningkat karena peran Komite Audit harus mampu memberikan gambaran hasil pemeriksaan perusahaan dalam segi operasionalnya dengan memperhatikan aspek-aspek syariah di dalamnya. Sejalan dengan *Syariah Enterprise Teori* dan teori

legitimasi, dengan adanya struktur Komite Audit yang baik akan mewujudkan pelaporan dan pengevaluasian yang tinggi sehingga dapat dijadikan bentuk pertanggung jawaban baik kepada Allah SWT maupun lingkungan masyarakat. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Asyhari (2016) dan Charles (2012) bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia. Hipotesis 3 : Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan ISR

### **Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting***

Dewan Pengawas Syariah merupakan organ yang berwenang untuk memberikan saran dan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Terlaksananya dengan baik seluruh tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah akan mewujudkan tingkat akuntabilitas pengungkapan tinggi sehingga dijadikan bentuk pelaksanaan amanah kepada Allah SWT dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai internalisasi kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip Syariah.

Hal ini berhubungan dengan dengan *Syariah Enterprise Teori*, serta menciptakan hubungan baik kepada masyarakat atas pengungkapan tersebut sebagai bentuk legitimasi masyarakat. Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Baidok dan Septiarini (2016), Arshad, *et al* (2014) dan Hidayati (2014) bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia.

Hipotesis 4 : DPS berpengaruh terhadap pengungkapan ISR

### **Pengaruh Leverage terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting***

*Leverage* merupakan kemampuan perusahaan atas proporsi penggunaan hutang

pada pembiayaan investasi. Harahap (2015:301) menjelaskan bahwa rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin besar tingkat *leverage* suatu perusahaan menganggap perlu memberikan laporan pengungkapan tanggung jawab sosial karena pada prinsip syariah segala bentuk hubungan, baik dengan pihak internal maupun eksternal, perusahaan harus memberikan segala bentuk pertanggungjawabannya.

Segala bentuk tanggung jawab harus dilaporkan terlebih lagi jika sudah berhubungan dengan pihak luar karena hal ini juga termasuk salah satu bentuk pelaksanaan amanah dan kontrol perusahaan dalam menjalankan organisasinya sesuai dengan prinsip Syariah yang terdapat dalam *Syariah Enterprise Teori*. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Asyhari (2016) bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hipotesis 5 : *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan ISR

**Pengaruh Likuiditas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting***

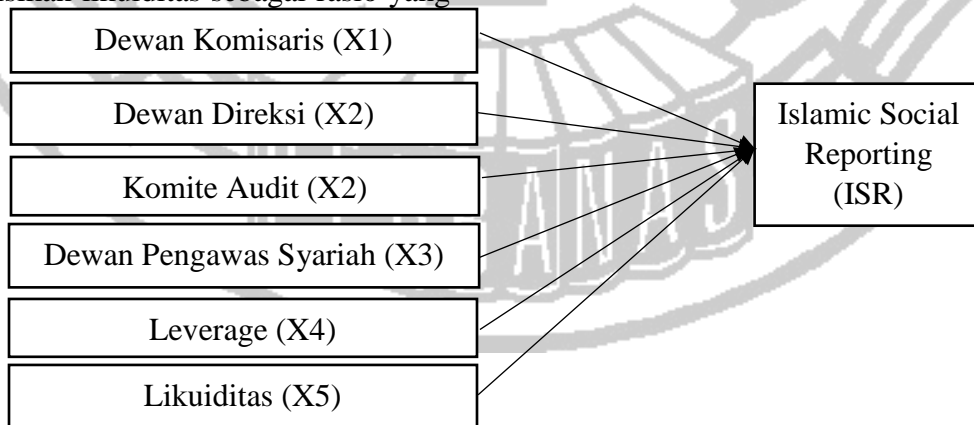
Harahap (2015:301) dalam penjelasannya mendefinisikan likuiditas sebagai rasio yang

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan memberikan sinyal kepada perusahaan lain bahwa mereka lebih kredibel dibanding perusahaan lainnya sehingga cenderung akan melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar. Sinyal tersebut dilakukan dengan cara memberikan informasi yang lebih luas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan.

Prinsip syariat Islam dalam *Sharia Enterprise Theory* mewajibkan segala perlakuan harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, terlebih lagi jika semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan diharapkan semakin tinggi pula kemampuan pengungkapan ISR. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Asyhari (2016) bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hipotesis 6 : Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

## METODE PENELITIAN

### Klasifikasi Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah pada periode 2012-2016. Metode pengambilan sampel menggunakan metode sensus (sampling jenuh) yang merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013:96). Dari 12 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia hanya terdapat 2 Bank Umum Syariah yang tidak mempublikasikan laporan tahunan yaitu BTPN Syariah tahun 2012 dan 2013. Sehingga, total sampel data yang diteliti sebanyak 58 data dari Bank Umum Syariah periode 2012-2016.

### Data Penelitian

Penelitian ini mengambil sampel Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2012-2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menekankan pengujian atas teori melalui variabel-variabel yang telah ditetapkan dengan menggunakan pengukuran data penelitian dan analisa data dengan prosedur statistik. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi.

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari media cetak atau elektronik seperti pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang dipublikasikan pada *official website* masing-masing Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

### Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel

dependen yaitu pengungkapan *Islamic Social Reporting* dan variabel independen yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, *Leverage* dan Likuiditas.

### Definisi Operasional Variabel

#### Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009, Dewan Komisaris merupakan dewan yang memiliki tugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, melakukan pengawasan terhadap manajemen pada pengelolaan perusahaan, serta pengawasan terhadap terlaksananya akuntabilitas.

Dewan Komisaris = Jumlah Anggota Dewan Komisaris

#### Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dewan Direksi = Jumlah Anggota Dewan Direksi

#### Komite Audit

Komite Audit adalah jumlah anggota Komite Audit pada suatu perusahaan yang diukur dengan cara menghitung jumlah anggota Komite Audit perusahaan yang disebutkan pada laporan GCG perusahaan.

Komite Audit = Jumlah Anggota Komite Audit

#### Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009, Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di suatu lembaga keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah = Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah



### Leverage

*Leverage* merupakan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar yang dapat menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. *Leverage* dapat diukur dengan menggunakan rasio *Debt to Asset Ratio* untuk menghitung total liabilitas terhadap total aset.

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

### Alat Analisis

Untuk menguji hubungan antara Dewan Komisaris (DK), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), Dewan Pengawas Syariah (DPS), *leverage* (DAR) dan likuiditas (CR) terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) Bank Umum Syariah tahun 2012-2016 digunakan model regresi linear berganda (*multiple regression analysis*).

Alasan dipilihnya model regresi linear berganda karena untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen pada penelitian yang dilakukan. Berikut persamaan regresi yang digunakan:

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Islamic Social Reporting* (ISR), Dewan

### Likuiditas

Likuiditas dapat diukur dengan menghitung total aset lancar terhadap utang lancar yang digambarkan dengan *current ratio*. Harahap (2015:301) mendefinisikan bahwa rasio tersebut menunjukkan sejauh mana aset lancar bisa menutupi kewajiban lancar.

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Lancar}}$$

$$\text{ISR} = \alpha + \beta_1\text{DK} + \beta_2\text{DD} + \beta_3\text{KA} + \beta_4\text{DPS} + \beta_5\text{DAR} + \beta_6\text{CR} + \varepsilon$$

Keterangan :

ISR = *Islamic Social Reporting*

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$  = Koefisien dari tiap variabel

DK = Dewan Komisaris

DD = Dewan Direksi

KA = Komite Audit

DPS = Dewan Pengawas Syariah

DAR = *Debt to Asset Ratio (Leverage)*

CR = *Current Ratio* (Likuiditas)

$\varepsilon$  = *Error Term*

Komisaris (DK), Dewan Direksi (DD), Komite Audit (KA), Dewan Pengawas Syariah (DPS), *leverage* (DAR) dan likuiditas (CR).

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
ISR	58	0,420	0,814	0,61396	0,108801
DK	58	2	6	3,74	1,001
DD	58	3	6	4,21	0,913
KA	58	2	6	3,74	1,036
DPS	58	2	3	2,34	0,479
DAR	58	0,058	0,675	0,17643	0,088160
CR	58	3,892	16,784	7,18749	2,655276

Sumber : Data diolah

Berdasarkan pada tabel 1 pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah tahun 2012-2016 memiliki nilai pengungkapan ISR terendah adalah sebesar 0,420 yang dimiliki oleh PT Bank Maybank Syariah (BMYS) tahun 2012. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,814 yang dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2015. Dari hasil nilai *mean* tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata ISR lebih besar dari standar deviasinya menunjukkan bahwa tingkat variasi data terjadi sangat rendah sehingga data tersebut dapat dikatakan bersifat homogen atau tidak beragam.

Nilai terendah dari Dewan Komisaris adalah 2 orang yang dimiliki oleh PT Bank Maybank Syariah (BMYS) pada tahun 2012. Dewan Komisaris tersebut meliputi dua dewan komisaris independen. Sedangkan nilai tertinggi dari Dewan Komisaris adalah 6, jumlah tersebut dimiliki oleh PT Bank Muamalat (BM) tahun 2012 hingga tahun 2013. Dewan Komisaris PT Bank Muamalat (BM) tersebut meliputi satu komisaris utama, dua komisaris dan tiga komisaris independen.

Nilai terendah dari Dewan Direksi adalah 3 dimana nilai minimum tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2012 ada empat bank yang memiliki tiga orang Dewan Direksi yaitu PT Bank Victoria Syraiah (BVS), PT BNI Syariah (BNIS), PT Bank Cental Asia Syariah (BCAS) dan PT Bank Maybank Syariah (BMYS). Sedangkan nilai tertinggi dari Dewan Direksi adalah 6, jumlah tersebut dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2012 hingga tahun 2016 dan PT Bank Muamalat (BM) tahun 2016.

Nilai terendah dari Komite Audit adalah 2 yang dimiliki oleh PT Bank Bukopin

Syariah (BBS) tahun 2012 sampai tahun 2014. Sedangkan nilai tertinggi Komite Audit adalah 6 yang dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2014 hingga tahun 2016. Nilai *mean* Komite Audit lebih besar dari standar deviasinya, hal tersebut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat variasi data atau bersifat homogen.

Nilai terendah Dewan Pengawas Syariah adalah 2 yang dimiliki oleh PT Bank Central Asia Syariah (BCAS), PT BNI Syariah (BNIS), PT Bank Bukopin Syariah (BBS), PT Bank Panin Syariah (BPS), PT BRI Syariah, PT Bank Victoria Syraiah (BVS) dan PT Bank Maybank Syariah (BMYS) pada tahun 2012 hingga tahun 2016. Sedangkan nilai tertinggi Dewan Pengawas Syariah adalah 3 yang dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank Mega Syariah dan PT Bank Muamalat (BM) pada tahun 2012 hingga tahun 2016.

Nilai terendah dari *leverage* adalah 0,058 yang dimiliki oleh PT Bank Victoria Syariah tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa PT Bank Victoria Syariah tahun 2014 memiliki rasio hutang yang rendah dengan menggunakan pendanaan pihak ketiga yang relatif lebih kecil untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Sedangkan nilai tertinggi adalah 0,675 yang dimiliki oleh PT Bank Victoria Syariah tahun 2012.

Nilai terendah dari likuiditas adalah 3,892 yang dimiliki oleh PT BRI Syariah (BRIS) tahun 2014. Sedangkan nilai tertinggi dari likuiditas adalah 16,784 yang dimiliki oleh PT Bank Victoria Syariah (BVS) tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan PT Bank Victoria Syariah (BVS) tahun 2014 menunjukkan tingkat likuiditas yang baik dibandingkan Bank Umum Syariah lain yang dijadikan sampel penelitian.

## Hasil Analisis dan Pembahasan

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	0,500	0,101	4,936	0,000
DK	0,063	0,016	3,954	0,000
DD	-0,029	0,019	-1,547	0,128
KA	0,026	0,014	1,892	0,064
DPS	0,016	0,029	0,547	0,586
DAR	-0,251	0,174	-1,441	0,156
CR	-0,012	0,006	-2,072	0,043
R <sup>2</sup>	0,415			
Adjusted R <sup>2</sup>	0,346			
F Hitung	6,037			
Sig. F	0,000			

### **Pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, koefisien regresi Dewan Komisaris adalah positif 0,063 artinya setiap kenaikan satu satuan DK akan menaikkan nilai koefisien regresi ISR sebesar 0,063 dengan asumsi variabel bebas selain DK dianggap konstan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dan teori pendukung yang menyatakan bahwa semakin tinggi Dewan Komisaris pada Bank Umum Syariah, maka semakin tinggi pula pengungkapan ISR. Mengingat wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki, Dewan Komisaris dapat menekan manajemen untuk mengungkapkan segala bentuk pelaporan perusahaan termasuk pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang terdapat didalam perusahaan.

Hasil pengujian statistik t menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima yaitu Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic*

*Social Reporting*. Hal ini bisa disebabkan karena optimalnya tugas dan wewenang Dewan Komisaris terutama dalam tugas pengawasan segala bentuk kegiatan perusahaan dan dapat mengawasi segala pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian tersebut juga berhubungan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris memiliki peran yang penting karena bertugas mengawasi perusahaan dan menyampaikan semua informasi kepada *stakeholders* termasuk informasi pengungkapan tanggung jawab sosial. Sehingga tercipta keselarasan hubungan antara perusahaan dan masyarakat atas adanya pengungkapan tersebut. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Baidok dan Septiarini (2016) serta Khoirudin (2013) yang menunjukkan Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

### **Pengaruh Dewan Direksi terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Koefisien regresi Dewan Direksi terhadap pengungkapan ISR adalah negatif 0,029 artinya setiap kenaikan satu satuan DD akan menurunkan nilai koefisien regresi ISR sebesar 0,029 dengan asumsi variabel bebas selain DD dianggap konstan. Hal ini berlawanan dengan penelitian terdahulu dan teori yang ada, yang menyatakan bahwa semakin besar Dewan Direksi maka pengungkapan ISR juga akan semakin meningkat dikarenakan tugas dan tanggungjawab Dewan Direksi sangat memiliki peran dalam peningkatan nilai perusahaan.

Hasil pengujian statistik  $t$  menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,128 > 0,05$ . Maka dalam penelitian ini hipotesis kedua (H2) ditolak yaitu Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Besarnya jumlah Dewan Direksi tidak mendorong Bank Umum Syariah melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang tinggi. Hal ini dapat disebabkan karena belum secara penuh pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang didasarkan atas prinsip Islam yang menyeluruh sehingga pengungkapan *Islamic Social Reporting* belum optimal.

Dikarenakan Direksi memiliki peranan tidak terbatas pada kegiatan rutin melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk masa mendatang, sehingga dibutuhkan jumlah Direksi yang harus disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Charles (2012) yang menunjukkan Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

### **Pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, koefisien regresi Koefisien regresi Komite Audit terhadap pengungkapan ISR adalah positif sebesar 0,026 artinya setiap kenaikan satu satuan KA akan menaikkan nilai koefisien regresi ISR sebesar 0,026 dengan asumsi variabel bebas selain KA dianggap konstan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dan teori pendukung yang menyatakan bahwa semakin tinggi Komite Audit pada Bank Umum Syariah, maka semakin tinggi pula pengungkapan ISR.

Hasil pengujian statistik  $t$  menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,064 > 0,05$ . Maka dalam penelitian ini hipotesis ketiga (H3) ditolak yaitu Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Salah satu faktor Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah konsep pengawasan terhadap praktik keuangan yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah masih belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan landasan syariah. Hal ini berdampak pada masih perlunya pengembangan sumber daya insani yang dapat berfokus pada standar audit berbasis AAOFI. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarto (2016) yang menunjukkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

### **Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, koefisien regresi Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan ISR adalah positif sebesar 0,016 artinya setiap kenaikan satu satuan DPS akan

menaikkan nilai koefisien regresi ISR sebesar 0,016 dengan asumsi variabel bebas selain DPS dianggap konstan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dan teori pendukung yang menyatakan bahwa semakin tinggi Dewan Pengawas Syariah pada Bank Umum Syariah, maka semakin tinggi pula pengungkapan ISR.

Hasil pengujian statistik  $t$  menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,586 > 0,05$ . Maka dalam penelitian ini hipotesis keempat (H4) ditolak yaitu Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hal ini disebabkan karena faktor Dewan Pengawas Syariah masih terfokus pada tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah rata-rata melakukan pengungkapan mengenai persetujuan produk baru, status halal produk dan pengawasan terhadap *akad* yang dilakukan sudah sesuai atau belum dengan prinsip syariah. Sedangkan aspek syariah yang lain seperti opini mengenai pelaksanaan zakat dan dana kebajikan belum diungkapkan dalam laporan tahunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asyhari (2016), Sunarto (2016), Rita,dkk (2015) dan Khoirudin (2013) menunjukkan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

#### **Pengaruh Leverage terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting***

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, koefisien regresi *leverage* terhadap pengungkapan ISR adalah negatif sebesar 0,251 artinya setiap kenaikan satu satuan DAR akan menurunkan nilai koefisien regresi ISR sebesar 0,251 dengan asumsi variabel bebas selain DAR dianggap konstan. Hal ini berlawanan dengan penelitian terdahulu dan teori yang ada, dimana

menurut Asyhari (2016) Bank Umum Syariah yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi menganggap perlu memberikan segala bentuk pengungkapan termasuk laporan pengungkapan tanggung jawab sosial, sehingga ada berita atau kabar baik tentang kinerja perusahaan.

Hasil pengujian statistik  $t$  menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,156 > 0,05$ . Maka dalam penelitian ini hipotesis kelima (H5) ditolak yaitu *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Dengan demikian semakin tinggi *leverage* menunjukkan bahwa tidak mendorong Bank Umum Syariah melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang tinggi pula. Hal ini disebabkan kemampuan kreditur dalam memperoleh informasi dan pengungkapan Bank Umum Syariah selain dari laporan tahunan perusahaan. Kreditur dapat memperoleh informasi melalui tanya jawab secara langsung pada perusahaan seperti meminta penjelasan manajemen tentang informasi keuangan dan pembahasan mengenai signifikan informasi keuangan tersebut. Hal ini yang menyebabkan kreditur tidak terlalu menuntut adanya kelengkapan pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sehingga tinggi rendahnya tingkat *leverage* tidak mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016), Rita,dkk (2015), Hidayati (2014), Putra, *et al* (2014) dan Rama (2014)

#### **Pengaruh Likuiditas Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting***

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, koefisien regresi likuiditas terhadap pengungkapan ISR adalah negatif sebesar 0,012 artinya setiap kenaikan satu satuan CR akan menurunkan nilai koefisien regresi ISR sebesar 0,012 dengan asumsi variabel bebas selain CR dianggap konstan. Hal ini berlawanan dengan penelitian

terdahulu dan teori yang ada, dimana menurut Asyhari (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat rasio likuiditas menunjukkan bahwa kemampuan pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah juga akan semakin luas.

Hasil pengujian statistik  $t$  menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,043 < 0,05$ . Maka dalam penelitian ini hipotesis keenam (H6) diterima yaitu likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sejalan dengan teori sinyal, yang menjelaskan bahwa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan segala bentuk informasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban sosial pada pihak eksternal serta memiliki fungsi dalam menekankan informasi penting yang berguna bagi para investor dalam menetapkan keputusan untuk pihak luar.

Dengan pengungkapan sosial yang dilakukan, maka akan memberikan sinyal positif kepada pihak luar tentang kredibilitas dan tingkat pemenuhan amanah yang tinggi pada Bank Umum Syariah. Menyebabkan tingkat likuiditas yang tinggi berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan memberikan sinyal kepada perusahaan lain bahwa mereka lebih kredibel dibanding perusahaan lainnya sehingga cenderung akan melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar. Sejalan dengan dalam *Sharia Enterprise Theory*, prinsip syariah islam dalam *Sharia Enterprise Theory* mewajibkan segala perlakuan harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, terlebih lagi jika semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan semakin tinggi pula kemampuan pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Asyhari (2016) bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Bank Umum Syariah di Indonesia.

## KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Dari pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hipotesis penelitian yang diterima yaitu Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (H1) dan likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (H6), dengan tingkat signifikansi sebesar lima persen (0,05). Sedangkan keempat hipotesis lainnya ditolak yaitu Dewan Direksi (H2), Komite Audit (H3), Dewan Pengawas Syariah (H4) dan *leverage* (H5) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Pada penelitian ini mempunyai keterbatasan (1) hasil uji *adjusted R<sup>2</sup>* hanya menunjukkan angka yang masih terbilang rendah yaitu sebesar 34,6%, menunjukkan masih ada sebesar 65,4% variabel lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR. (2) Sampel yang digunakan masih dalam lingkup Bank Umum Syariah dari Lembaga Keuangan Syariah yang juga dapat menggunakan indeks ISR. (3) Indeks pengungkapan ISR hanya menggunakan satu sumber acuan sehingga pengungkapan yang dilakukan kurang maksimal.

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel baru agar pengaruh variabel lain di luar model dapat diungkapkan dan dapat lebih memperkuat hasil penelitian seperti ukuran bank, kepatuhan syariah dan kepemilikan manajerial, dapat mempertimbangkan sampel selain Bank Umum Syariah seperti Jakarta Islamic index, karena pengungkapan *Islamic Social Reporting* tidak hanya dalam lingkup perbankan Syariah tetapi lembaga keuangan syariah yang lain serta disarankan untuk menggunakan indeks ISR selain dari

Khusnul dan Prabowo (2013). Dengan tujuan penelitian yang dihasilkan lebih maksimal.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Arshad, R., Muhammad, M., & Rohama, O. 2014. Board Composition, Islamic Corporate Social Responsibility and Corporate Reputation of Islamic Banks. *Proceedings of World Business and Economics Research Conference*. Pp 1-20.
- Asrori. 2015. Pengaruh GCG, Size, Jenis Produk Dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Pengungkapan ISR. *Accounting Analysis Journal*, 1-15.
- Asyhari, L. D. 2016. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. 1-24.
- Baidok, W. & Septiarini, D. F. 2016. Pengaruh Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Syariah, Dan Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10-20.
- Bringham, E. F. & Huston, J. F. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Edisi 11*. Jakarta : Salemba Empat.
- Charles, C. 2012. Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-15.
- DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001 fungsi Dewan Pengawas Syariah
- Fitria dan Hartanti. 2010. Islam dan Tanggung Jawab Sosial : Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan *Global Reporting Initiative* Indeks dan *Islamic Social Reporting* Indeks. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Cetakan Ke-8 Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, N. 2011. *Corporate Social Responsibility edisi Pertama*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hanafy, M. & Halim, A. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Hidayati, M. 2014. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di OJK. *Jurnal Ekonomi Universitas Maulana Malik Ibrahim*, 1-10.
- Indriantoro, N. & Supomo, B. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Iwan, T. 2012. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Khoirudin, A. 2013. Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2), 1-16.

- Khusnul, F. & Prabowo, Y. 2013. Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1), 12-20.
- Lestari, S. 2016. Pengaruh Tingkat Profiabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2010-2014. *Jurnal Akuntansi Unesa*.
- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. 2009. Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Sharia-Approved Companies in Bursa Malaysia. *Reaserch Journal of International Studies*.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 2010 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Putra, M. P., Erika, T., & Yaser, A. 2014. Determinant on Islamic Social Reporting in Islamic Banking (Case Study indonesia). *International Conference of Global Islamic Studies 2014*. Pp 1-14.
- Rama, A. 2014. Analisis Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting: Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Equilibrium*, 2(1), 1-25.
- Rita, R., Bustanul, A., & Hamdani, M. 2015. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Islamic Governance Score Terhadap Pengungkapan Islamic Social. *ESENSI Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(1), 1-18.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, C. N. 2016. Shariah Governance Dalam Pengungkapan Islamic Social Reporting Index Dan Global Reporting Index Pada Perbankan Syariah Periode 2010-2013. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 1-15
- Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbs tanggal 29 April 2010 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Suwardjono. 2013. *Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan* Edisi 4. Yogyakarta : BPFEE.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang RI No 21 Tahun 2008 pasal 4